



CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN AGRESIVITAS PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI PEMODERASI

(Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)

Vina Yunistiyani^{a,*}, Afrizal Tahar^b

^{a,b}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Ringroad Selatan Kasihan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

^{*}(vina.yunistiyani@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* dan agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak dengan *good corporate governance* sebagai variabel pemoderasi. Variabel *Good Corporate Governance* yang digunakan pada penelitian ini diproksikan dengan proporsi komisaris independen dan komite audit. Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015. Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan sampel dari 64 perusahaan selama periode pengamatan 2 tahun berturut-turut, sehingga menghasilkan 128 sampel. Teknik analisis yang digunakan untuk pengujian adalah regresi linier berganda berbantuan aplikasi statistika SPSS 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, proporsi komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh dalam memoderasi hubungan agresivitas pelaporan keuangan dengan agresivitas pajak.

Kata kunci: *corporate social responsibility*; agresivitas pelaporan keuangan; agresivitas pajak; komisaris independen; komite audit

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect corporate social responsibility and financial reporting aggressiveness towards tax aggressiveness with good corporate governance as moderating variable. Good corporate governance which is proxied by board of independence commissioner proportion and audit committee. This study are focusing on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2014-2015. The sampling method used was purposive sampling with a sample of 64 companies during the observation period of 2 years in a row so as to produce a total of 128 samples. Analysis technique used was multiple regression analysis by SPSS 22.0. The result reveal corporate social responsibility and financial reporting aggressiveness degree of tax aggressiveness. Board of independence commissioners and audit committee as the moderating

variable have no influence between financial reporting aggressiveness and tax aggressiveness.

Keywords: *corporate social responsibility, financial reporting aggressiveness, tax aggressiveness, board of independence commissioner, audit committee*

PENDAHULUAN

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPH), baik PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun PPh Wajib Pajak Badan. Kewajiban membayar pajak diatur dalam surat At-Taubah ayat 29 dan Undang-undang Dasar 1945 Amandemen III pasal 23A. Selain memenuhi kewajiban perpajakan, WP Badan harus memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang sudah menjadi *mandatory disclosure* sejak diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan yang memiliki peringkat *Corporate Social Responsibility* (CSR) rendah dianggap tidak bertanggungjawab secara sosial. Adanya CSR menjadikan perusahaan memiliki dua kewajiban, yaitu kegiatan CSR dan membayar pajak, sehingga semakin banyak pengeluaran dan menyebabkan perusahaan semakin agresif.

Fakta yang terjadi di masyarakat adalah belum semua WP taat

memenuhi kewajibannya, sehingga penerimaan negara dari sumber pajak dinilai masih rendah (Wicaksono, 2015). Rendahnya penerimaan pajak tercermin dari rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih di bawah 11% pada tahun 2015 (Wicaksono, 2015). Seharusnya 13-14% (Jannah, 2016). Rendahnya penerimaan pajak mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan WP. Kasus penghindaran pajak terjadi pada sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar royalti kepada *holding company* di Belanda dari 3,5% meningkat menjadi 5-8% mulai tahun 2013-2015 (Suryana, 2013). Peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk berpotensi mengurangi PPh Badan yang harus dibayar perusahaan, sehingga memungkinkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Pada dasarnya WP Badan berusaha meminimalisir jumlah pajak yang dibayarkan dengan cara meminimalisasi jumlah laba kena pajak. Akan tetapi, laba yang rendah

tidak menarik bagi *stakeholder* dan *shareholder*, sehingga menimbulkan *trade off*. Akankah perusahaan memaksimalkan jumlah laba, tetapi beban pajak tinggi atau meminimalisasi jumlah laba. Konflik dalam pengungkapan CSR dan agresivitas pelaporan keuangan terjadi antara *principal* dan *agen*, karena belum terjadi keselarasan antar kedua belah pihak. Hal tersebut dapat diatasi melalui *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai mekanisme yang digunakan untuk mengontrol manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). GCG diproksikan dengan Komisaris Independen dan Komite Audit. Komisaris independen berperan pengontrol tindakan manajemen agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku, sedangkan komite audit membantu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Komite Audit yang independen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan tidak memihak manapun demi kepuasan semua pihak berkepentingan.

Berdasarkan literatur yang penulis temukan, penelitian tentang agresivitas pajak di Indonesia telah dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015), hasil penelitian menunjukkan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak,

sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan. Rini dkk.,(2015), Lanis dan Richardson (2013) hasil penelitian menunjukkan agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap CSR. Jessica dan Toly (2014), hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak.

Ridha dan Martani (2014), hasil menunjukkan agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan memiliki hubungan positif. Kamila (2014), hasil penelitian menunjukkan agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Winarsih dkk., (2014), hasil penelitian menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan dewan direksi, ukuran komite audit dan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini dimotivasi oleh maraknya kasus agresivitas pajak yang sedang *booming* beberapa tahun terakhir seperti panama paper (*tax havens country*), peningkatan pembayaran royalti sebuah perusahaan *consumer goods* yang memiliki *holding company* di Belanda, *transfer pricing*, pajak bonus karyawan *Investment Banking*, google, dll. Wicaksono (2015) memaparkan kasus serupa yang terjadi di

Indonesia, hal ini terlihat dari rendahnya *tax ratio* di bawah 11% pada tahun 2015 padahal kondisi perekonomian sedang berkembang pesat, untuk negara berkembang seharusnya 13-14% (Jannah, 2016). Peningkatan jumlah surat teguran, surat perintah melakukan penyitaan, pemberitahuan surat paksa, pemblokiran rekening bank, pelelangan hasil sita yang disampaikan oleh DJP dalam web pajak.go.id memperkuat pentingnya penelitian ini dilakukan. Motivasi lain dari penelitian adalah ingin mengetahui efektivitas pemenuhan CSR dan GCG, akankah hanya sebagai pemenuhan regulasi semata atau berjalan efektif juga dari segi perpajakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah CSR dan agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan apakah GCG memoderasi hubungan agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini penting karena, pertama, proksi pengukuran agresivitas pajak menggunakan *Net Profit Margin* (NPM), sehingga lebih menggambarkan agresivitas pajak. Kedua, dengan menggunakan tahun yang berbeda, penelitian ini ingin mengkonfirmasi dan menindaklanjuti hasil penelitian

Kamila (2014). Ketiga, ingin menguji kembali ketidakkonsistenan pengaruh GCG terhadap agresivitas pajak, karena baru ada 1 penelitian yang dilakukan Utami dan Setyawan (2015) yang menggunakan GCG sebagai pemoderasi agresivitas pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori legitimasi, teori agensi dan teori *stakeholder*. Bagi Legislatif, menjadi bahan evaluasi dan perbaikan penerapan Undang-undang Perpajakan, bagi OJK menjadi bahan evaluasi efektivitas penerapan GCG dan tindakan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, memberikan informasi bagi perusahaan untuk menggunakan sumber dayanya dengan efektif untuk mengefisienkan beban pajak serta menjadi bahan evaluasi penerapan CSR, kesesuaian pelaporan keuangan, dan efektivitas penerapan GCG.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Legitimasi

Menurut Ghazali dan Chariri (2007), teori legitimasi tercipta karena adanya kontrak sosial antara masyarakat dengan perusahaan yang melaksanakan kegiatan operasinya menggunakan sumber daya ekonomi, sehingga perlu diatur mengenai hak

dan kewajiban masing-masing. Kontrak sosial antara kedua belah pihak akan menjadi dasar pencapaian tujuan perusahaan dan masyarakat, sehingga tercipta legitimasi.

Sejalan dengan pendapat Gray *et al.*, (1995), perusahaan (melalui manajemen) memberikan informasi CSR sebagai cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Aktivitas CSR dilakukan perusahaan untuk menunjukkan sistem nilai perusahaan telah selaras dengan sistem sosial tempat perusahaan beroperasi. Berdasarkan teori legitimasi, pengungkapan CSR dilakukan untuk mendapat legitimasi dari masyarakat, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta dapat meningkatkan nilai perusahaan (Ratmono dan Sagala, 2015).

Hubungan CSR dan agresivitas pajak dalam penelitian ini dijelaskan menggunakan teori legitimasi. Lanis dan Richardson (2013) berpendapat bahwa masyarakat menganggap agresivitas pajak merupakan tindakan yang ilegal, tidak bertanggungjawab dan merusak citra perusahaan, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat dan bisa mengancam keberlangsungan usaha. Salah satu

cara untuk menutupi citra tersebut dengan pemenuhan kewajiban CSR.

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah kontrak antara satu atau lebih individu dengan individu lain, salah satu pihak berperan sebagai *principal* dan pihak lain sebagai *agent*. Menurut Rebecca (2012) teori keagenan adalah hubungan yang timbul akibat adanya kontrak antara pemilik modal dan penerima pekerjaan.

Ketika *principal* dan *agent* berkeinginan untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing (belum ada keselarasan), maka ada kemungkinan *agent* bertindak tidak untuk kepentingan *principal*. *Principal* berusaha untuk memaksimalkan laba (*risk takers*), sedangkan *agent* sebagai pelaksana aktivitas cenderung tidak menyukai resiko yang terlalu besar (*risk adverse*). Untuk mengurangi konflik, maka *principal* perlu *monitoring* kinerja *agent*. Laporan keuangan dan berbagai informasi lainnya yang disampaikan kepada publik adalah salah satu bentuk alat *monitoring* untuk mengurangi *agency cost* (Hendriyani dan Tahar, 2015). Dalam penyampaian laporan keuangan terdapat asimetri informasi

antara *agent* dan *principal*, *agent* memiliki informasi yang lebih banyak dibanding *principal*, karena *agent* hanya mengungkapkan sedikit mengenai laporan keuangan perusahaan (Sutiyok dan Rahmawati, 2014).

Implikasi teori keagenan terhadap penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa pihak manajemen (*agent*) tidak terlepas dari praktik agresivitas pelaporan keuangan, oleh karena itu laporan yang disajikan belum tentu merepresentasikan laba yang sesungguhnya. Hal tersebut dilakukan agar kinerja manajemen seolah meningkat dari tahun ke tahun dan berhasil mencapai target yang diinginkan.

Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan individu atau sekumpulan orang (kelompok) yang memiliki kepentingan bisnis dengan perusahaan atau organisasi (Sutiyok dan Rahmawati, 2014). Keberadaan suatu organisasi (perusahaan) tidak terlepas dari pengaruh orang-orang atau kelompok yang memiliki hubungan dengan organisasi. Adanya teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan tidaklah bersifat individualis dan mementingkan diri sendiri dalam menjalankan kegiatan operasinya.

Teori *stakeholder* dapat memengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan laporan tahunannya secara luas dan transparan, karena campur tangan pihak lain sangat dibutuhkan demi kelangsungan kegiatan operasionalnya (*going concern*).

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan disekitar tempat beroperasi, sehingga mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Menurut Fatayatiningrum (2011) tujuan utama dari teori *stakeholder* untuk membantu manajer mengerti lingkungan *stakeholder* dan melakukan pengelolaan yang lebih efektif. Tujuan yang lebih luas dari teori *stakeholder* adalah membantu manajer perusahaan dalam meningkatkan *value added* dan meminimalisir kerugian.

Menurut teori *stakeholder*, perusahaan yang memiliki peringkat CSR tinggi lebih menarik bagi konsumen, sehingga perusahaan harus memenuhi kewajiban CSRnya (Cheers, 2011 dalam Yoehana, 2013). Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* melalui berbagai tindakan perusahaan yang bersifat persuasif dan memberikan *feedback* baik

kepada *stakeholder*. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah pemenuhan tanggung jawab sosial. Jadi, pada intinya teori *stakeholder* mempertimbangkan semua pihak yang terkena dampak aktivitas organisasi (perusahaan).

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) mulai dikenal sejak awal tahun 1970an. Definisi CSR menurut *World Business Council in Sustainable Development* adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat. CSR merupakan kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai yang sesuai peraturan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan (Kartika, 2013). CSR merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan baik dalam bentuk penjagaan lingkungan, partisipasi pembangunan, norma masyarakat, dan berbagai macam bentuk

tanggung jawab sosial lainnya (Irawan, 2016).

Dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf (b) mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dipenuhi perusahaan menjadi dasar bahwa CSR bukan lagi wacana publik semata, tetapi sudah menjadi *mandatory disclosure*. Perusahaan memiliki berbagai motivasi dalam pengungkapan CSR, mulai dari pendekatan instrumental untuk memaksimalkan profit, pendekatan intrinsik seperti komitmen perusahaan untuk menjunjung tinggi nilai dan prinsip perusahaan serta menjaga reputasi perusahaan (Nahar, 2012). Pemenuhan CSR yang dilakukan perusahaan selain memberikan dampak positif, terkadang memunculkan bias, banyak perusahaan yang memberikan CSR justru untuk menutupi berbagai kecurangan yang dilakukan, salah satunya agresivitas pajak.

Agresivitas Pelaporan Keuangan

Sebagian besar pengguna laporan keuangan menganggap bahwa informasi laba sangatlah penting, sehingga manajemen perusahaan cenderung melaporkan

laba yang besar demi kepuasan *stakeholder* dan *shareholder*, padahal laba belum tentu merepresentasikan kondisi perusahaan secara riil. Dalam buku *Accounting Theory* karya Scott (2009), motivasi perusahaan melaporkan laba yang tinggi adalah pemberian bonus, politik, *Initial Public Offering* (IPO), perjanjian hutang jangka panjang, pemenuhan ekspektasi investor, reputasi dan perubahan CEO. Beberapa alasan di atas melatarbelakangi perilaku pelaporan keuangan perusahaan cenderung agresif dengan manipulasi laba, baik memperbesar maupun memperkecil laba sesuai tujuan yang diharapkan. Usaha meningkatkan laba perusahaan baik sesuai maupun tidak sesuai prinsip akuntansi yang berlaku disebut agresivitas pelaporan keuangan (Frank *et.al*, 2009).

Berdasarkan teori keagenan, agresivitas pelaporan keuangan dilakukan demi kepuasan *stakeholder* dan *shareholder* atas peningkatan laba bersih setelah pajak. Anggapan tersebut sebenarnya bertentangan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan dilakukan perusahaan sebagai bentuk akuntabilitas dan *monitoring* publik terhadap manajer.

Good Corporate Governance (GCG)

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) (2012) mengartikan GCG sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan *value added* perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku, sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 pasal 1 ayat 1 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Good Corporate Governance adalah suatu sistem yang ada pada organisasi untuk membantu kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* organisasi tersebut (Pratolo, 2008). Penerapan GCG diperlukan agar tercipta efisiensi pasar, transparan dan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan. Prinsip GCG sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP 01/MBU/2011 pasal 3 ada 5, yaitu

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesejahteraan.

Prinsip-prinsip GCG diperlukan oleh perusahaan terutama berkaitan dengan penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Manfaat pelaksanaan GCG menurut IICG (2012), adalah meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar, menjaga *sustainability* perusahaan, mengurangi *agency cost* dan *cost of capital*, meningkatkan kinerja, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*, melindungi organ dari intervensi politik dan tuntutan hukum, serta membantu terwujudnya GCG. Manfaat penerapan GCG dapat dirasakan ketika perusahaan menerapkan GCG serta memiliki organ perusahaan sebagai pelaksana kegiatan dalam perusahaan. Organ perusahaan akan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama perusahaan (Winarsih dkk., 2014).

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006), organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini diprosikan dengan Komisaris Independen dan Komite Audit. Komisaris independen diharapkan mampu menjalankan

tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjamin bahwa mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006). Komite Audit berperan membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pelaksanaan audit internal dan eksternal sesuai dengan standar audit yang berlaku, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, dan tindak lanjut hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006).

Agresivitas Pajak

Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak seringkali melakukan penghematan beban pajak demi pencapaian laba sesudah pajak yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan karena ada benturan kepentingan antara *stakeholder* dengan pihak manajemen. Ketidakselarasan tersebut, membuat manajer melakukan berbagai hal demi kepuasan *stakeholder*, salah satunya dilakukan dengan meminimalisir jumlah laba, sehingga jumlah beban pajak yang dibayarkan rendah, baik melalui cara yang legal maupun ilegal yang sering disebut agresivitas pajak.

Menurut Frank *et al.*, (2009), agresivitas pajak dilakukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik dengan cara *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Agresivitas pajak dapat dilakukan karena ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan maupun aktivitas penghematan pajak sesuai peraturan. Perusahaan yang memanfaatkan celah peraturan untuk mengurangi beban pajak dianggap telah melakukan agresivitas pajak walaupun tidak menyalahi aturan yang ada (Kamila, 2014). Prayogo (2015) menyatakan bahwa untuk mengurangi pembayaran pajak, dapat dilakukan dengan cara memperbesar jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan atau memperkecil pendapatan.

Agresivitas pajak merupakan bagian dalam hal perencanaan pajak yang mengarah pada penghindaran pajak. Terdapat perbedaan antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak. Agresivitas pajak dilakukan melalui perencanaan yang lebih agresif untuk mengurangi pajak terhutang perusahaan (Jessica dan Toly, 2014).

Tujuan utama agresivitas pajak untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Jumlah pajak yang dibayarkan sebesar hasil perkalian antara pendapatan kena pajak (PKP)

dengan tarif pajak (*tax rate*) yang telah ditetapkan negara. PKP diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan UU PPh. Pajak yang dibayar perusahaan bergantung pada koreksi pajak atau selisih antara laba dengan pendapatan kena pajak (*book tax difference*), sehingga teknik dalam melakukan agresivitas pajak dengan mengatur *book tax difference* (Kamila, 2014). Setiap tindakan yang akan dilakukan manajer pasti dipertimbangkan terlebih dahulu *cost and benefit* yang akan diterima, termasuk keputusan melakukan agresivitas pajak.

Corporate Social Responsibility dan Agresivitas Pajak

Corporate Social Responsibility merupakan salah satu bentuk kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat beroperasi yang terkena dampak aktivitas operasional agar tindakan perusahaan dinilai sesuai norma yang berlaku di masyarakat dan mendapatkan legitimasi dari berbagai pihak. Pemenuhan kewajiban CSR dapat dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa, pembangunan tempat sosial, penanaman pohon untuk mengurangi dampak rumah kaca, penyaringan limbah sebelum di buang, tunjangan

kepada karyawan, memberi kesempatan masyarakat sekitar untuk bekerja di perusahaan tersebut, pelatihan P3K kepada karyawan, kesempatan magang siswa/i SMA/SMK serta mahasiswa, dan berbagai hal lainnya.

Perusahaan yang memenuhi kewajiban CSR, dianggap bertanggung jawab secara sosial serta memiliki citra baik dimata masyarakat. Selain kewajiban CSR, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang dilakukan secara suka rela, penuh kesadaran, sesuai nominal yang ditetapkan dan tidak berupaya untuk melakukan agresivitas pajak, agar dapat membina hubungan baik dengan pemerintah.

Menurut Slemrod (2004) kaitan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama perusahaan untuk memperoleh *profit maximum* tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Deegan (2002) pengungkapan CSR digunakan oleh manajemen sebagai salah satu cara berinteraksi dengan masyarakat luas.

Argumen di atas juga didukung dengan teori *legitimasi* dan *stakeholder*, dimana perusahaan harus mempertimbangkan kepuasan semua pihak dalam pelaksanaan

aktivitas perusahaan dan pengambilan keputusan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, hal tersebut dilakukan agar seolah-olah perusahaan telah memenuhi kewajibannya.

Jessica dan Toly (2014) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak, sehingga kegiatan CSR tidak mempengaruhi perusahaan untuk membayar pajak yang lebih kecil. Ratmono dan Sagala (2015) menyatakan bahwa tingkat pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Jessica dan Toly (2014) serta Ratmono dan Sagala (2015) memberikan dukungan empiris untuk teori legitimasi bahwa perusahaan selalu berusaha mendapat dukungan dari lingkungan institusionalnya.

Hasil penelitian Rini dkk., (2015) menunjukkan bahwa sensitivitas agresivitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian Lanis dan Richardson (2013), Pradipta dan Supriyadi (2015) juga menunjukkan hasil yang signifikan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak. Artinya, perusahaan yang melakukan

tindakan pajak agresif, melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas daripada perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan teori yang ada dan logika hipotesis yang telah diuraikan di atas, peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak

Agresivitas pelaporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk memperbesar atau memperkecil laba, baik dengan cara legal maupun ilegal sesuai tujuan yang ingin dicapai. Untuk kepentingan *stakeholder* serta *shareholder*, perusahaan berusaha menyajikan laba yang besar dalam laporan keuangan untuk menarik minat investor, kreditor, *supplier*, dan berbagai pihak yang berkepentingan lainnya. Di lain sisi, jumlah laba yang dilaporkan juga berpengaruh terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Ketika perusahaan melakukan manajemen pajak dengan cara mengurangi laba kena pajak akan menyebabkan *financial reporting costs* karena pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dan

mengakibatkan persepsi kinerja perusahaan yang kurang baik (Shackelford dan Shelvin, 2000). Manajemen laba (memperbesar laba bersih) pada laporan keuangan menyebabkan munculnya *tax costs* karena beban pajak yang harus dibayar meningkat. Hal tersebut memunculkan *trade-off* diantara keduanya.

Hasil penelitian Frank *et al.*, (2009) dan Kamila (2014) menunjukkan bahwa *trade off* antara pajak dan pelaporan keuangan tidak selalu terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena memanfaatkan adanya celah pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a maupun menggunakan cara yang tidak diperbolehkan, sehingga perusahaan bisa merepresentasikan laba yang tinggi tanpa melakukan pembayaran pajak yang besar (Frank *et al.*, 2009). Semakin tinggi agresivitas pelaporan keuangan, semakin tinggi juga agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Kamila (2014) menemukan hubungan resiprokal antara agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak. Penelitian Ridha dan Martani (2014) sejalan dengan penelitian Kamila (2014), bahwa agresivitas pajak dan

agresivitas pelaporan keuangan memiliki hubungan dua arah (resiprokal). Hasil penelitian Ridha dan Martani (2014) serta Kamila (2014) sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Frank *et al.*, (2009) yang menunjukkan bahwa agresivitas pelaporan keuangan berhubungan positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan teori yang ada dan logika hipotesis yang telah diuraikan di atas, peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Efek Moderasi Komisaris Independen atas Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak

Komisaris Independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang bersal dari pihak independen (tidak terafiliasi dengan perusahaan). Komisaris Independen menjadi salah satu organ perusahaan yang berperan dalam penerapan GCG. Komisaris Independen dan Dewan Komisaris lainnya diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjamin bahwa mekanisme pengawasan berjalan secara efektif

dan sesuai peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006). Dewan Komisaris membuat berbagai kebijakan strategis yang menguntungkan perusahaan, tetapi tidak melanggar hukum, termasuk kebijakan perpajakan.

Hasil penelitian Minnick dan Noga (2010) memberikan dukungan pentingnya peranan tata kelola perusahaan terhadap perencanaan manajemen pajak secara jangka panjang. Lanis dan Richardson (2011) menemukan bahwa keberadaan Dewan Independen mampu mengurangi agresivitas pajak. Hasil penelitian Richardson *et al.*, (2013) menunjukkan agresivitas pajak dapat dikurangi apabila sistem pengendalian risiko baik, keberadaan auditor eksternal berkualitas serta independensi anggota Komite Audit dan kuatnya kontrol internal.

Penerapan GCG juga dapat mengurangi agresivitas pelaporan keuangan, karena adanya pengawasan dari Komisaris Independen dan Komite Audit. Komisaris Independen memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku dan tidak melanggar peraturan pemerintah lainnya. Jika Komisaris Independen dan organ perusahaan lainnya dapat bekerja maksimal sebagaimana mestinya,

maka tindakan agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak dapat diminimalisir. Berdasarkan teori yang ada dan logika hipotesis yang telah diuraikan di atas, peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H_{3a}: Agresivitas pelaporan keuangan yang diperkuat dengan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Efek Moderasi Komite Audit atas Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak

Komite Audit merupakan organ perusahaan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dalam pelaksanaan tugas. Perusahaan *go public* minimal harus memiliki Komite Audit, untuk komite lainnya dibentuk sesuai kebutuhan (KNKG, 2006). Komite Audit berperan dalam penerapan GCG.

Komite Audit berperan membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pelaksanaan audit internal dan eksternal sesuai dengan standar audit yang berlaku, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, dan tindak lanjut hasil audit dilaksanakan

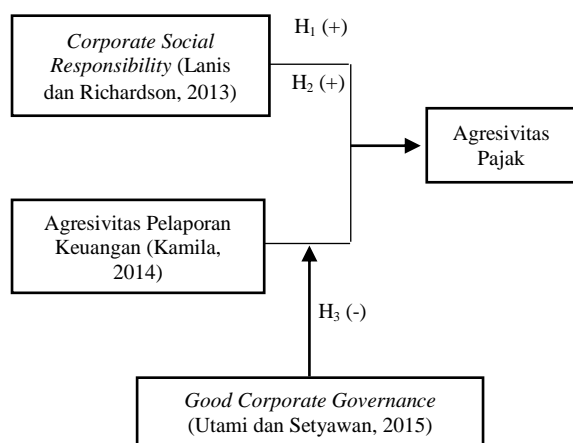
oleh manajemen (KNKG, 2006). Semakin besar ukuran Komite Audit, *monitoring* terhadap agresivitas semakin tinggi, sehingga meningkatkan keandalan laporan keuangan (Winarsih, 2014).

Hasil penelitian Minnick dan Noga (2010) memberikan dukungan pentingnya peranan tata kelola perusahaan terhadap perencanaan manajemen pajak secara jangka panjang. Hasil penelitian Richardson *et al.*, (2013) menunjukkan agresivitas pajak dapat dikurangi apabila sistem pengendalian risiko baik, keberadaan auditor eksternal berkualitas serta independensi anggota Komite Audit dan kuatnya kontrol internal. Penerapan GCG juga dapat mengurangi agresivitas pelaporan keuangan, karena adanya pengawasan dari Komisaris Independen dan Komite audit. Komite Audit berperan untuk melengkapi tanggung jawab Komisaris Independen, yaitu memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan bukti-bukti yang ada atas transaksi riil perusahaan. Ketika Komisaris Independen dan Komite Audit dapat bekerja maksimal sebagaimana mestinya, maka tindakan agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak dapat diminimalisir. Berdasarkan teori yang ada dan

logika hipotesis yang telah diuraikan di atas, peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H_{3b}: Agresivitas pelaporan keuangan yang diperkuat dengan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Model penelitian disajikan dalam gambar 1 untuk memberikan kemudahan pemahaman variabel mana yang dimoderasi. Berikut disajikan dalam tampilan di bawah:



METODE

Definisi Operasional Variabel

Agresivitas Pajak menjadi variabel dependen dalam penelitian ini yang diproksikan dengan *Net Profit Margin* (NPM). Pengukuran agresivitas pajak mengadopsi penelitian Adisamartha dan Noviari (2015) menggunakan NPM index. Apabila NPM perusahaan berada di bawah NPM industri, terdapat indikasi bahwa perusahaan tersebut tidak melaporkan laba sebenarnya.

$$NPM_{index} = \frac{NPM \text{ Perusahaan}}{NPM \text{ Industri}} \times 100\%$$

Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR dan agresivitas pelaporan keuangan. CSR diukur menggunakan indikator *Global Reporting Initiative* G.4 (GRI G.4) yang diperoleh dari *website* www.globalreporting.org dan mengacu pada penelitian Rini dkk., (2015). Terdapat 91 item pengungkapan CSR yang terbagi dalam aspek ekonomi, lingkungan, praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab atas produk. Apabila perusahaan mengungkapkan setiap item indikator CSR, maka diberi nilai 1 dan jika tidak diungkapkan diberi nilai 0. Selanjutnya skor dari semua item dijumlah dibagi dengan total item pengungkapan yang diharapkan untuk setiap perusahaan.

$$CSRI_i = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Keterangan:

$CSRI_i$: Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i

$\sum X_{yi}$: nilai 1 jika item y diungkapkan, nilai 0 jika item y tidak diungkapkan

n_i : jumlah item untuk perusahaan i, $n_i \leq 91$

Agresivitas pelaporan keuangan diukur menggunakan proksi akrual

diskresioner yang dihitung dengan *the modified-Jones Model* yang mengacu pada penelitian Ridha dan Martani (2014), Kamila (2014):

$$TA_{it} = Nit - CFO_{it}$$

Nilai *total accrual* (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_t}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{it-1}} \right) + e$$

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas nilai *non discretionary accruals* (NDA) dapat dihitung dengan rumus:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_t}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rect}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{it-1}} \right)$$

Selanjutnya *discretionary accruals* (DA) dapat dihitung sebagai berikut:

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan:

DA_{it} : *Discretionary accruals* perusahaan i periode ke t

NDA_{it} : *Non Discretionary Accruals* perusahaan i periode ke t

TA_{it} : Total akrual perusahaan i periode ke t

Nit : Laba bersih perusahaan i periode ke t

CFO_{it} : Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i periode ke-t

Ait-1 :Total aktiva perusahaan i periode ke t-1

ΔRev_t :Perubahan pendapatan perusahaan i periode ke t

PPE_t :Aktiva tetap perusahaan periode ke t

ΔRect :Perubahan piutang perusahaan i periode ke t

e :error

Selain variabel independen, penelitian ini menggunakan variabel moderasi GCG yang diproksikan dengan proporsi Komisaris Independen dan keberadaan Komite Audit, sebagaimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami dan Setyawan (2015). Berdasarkan peraturan BEI, ketentuan jumlah Komisaris Independen minimal 30% dari seluruh anggota komisaris dan setiap perusahaan diwajibkan memiliki komite audit. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Proporsi KI

$$= \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}} \times 100\%$$

Metode Penentuan Sampel

Sampel penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2015. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel penelitian karena perusahaan mengolah sendiri bahan baku

menjadi barang jadi, sehingga peluang untuk melakukan manipulasi pengeluaran atau beban lebih besar. Teknik pemilihan sampel adalah *purposive sampling*. Data penelitian diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Yogyakarta tahun 2014-2015. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur terdaftar penuh di BEI tahun 2014-2015 dan menerbitkan *annual report* yang berakhir pada 31 Desember dan lengkap dengan data penelitian.
2. Mengungkapkan laporan CSR
3. Memiliki laba bersih bernilai positif
4. Menggunakan satuan mata uang rupiah
5. Pengecualian untuk variabel agresivitas pajak, sebagai pembanding NPM perusahaan dengan NPM industri, maka NPM industri menggunakan semua perusahaan manufaktur yang ada di BEI meskipun rugi dan/atau bermata uang dolar.

Berdasarkan kriteria di atas, diperoleh 64 perusahaan sebagai sampel dalam penelitian ini dengan 128 observasi selama 2 tahun berturut-turut.

Teknik Analisis Data

BLUE Test

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Model regresi yang baik memiliki nilai residual berdistribusi normal. Uji statistik dapat dilakukan dengan menguji normalitas residual dengan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov. Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ (0,05) maka data dinyatakan berdistribusi normal (Nazaruddin dan Basuki, 2016).

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam suatu model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen, maka hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen akan terganggu. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas di dalam model regresi, maka dapat dilihat dari nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Tidak terjadi multikolinearitas

jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Mendeteksi autokorelasi yaitu dengan melihat angka *Dusbin Watson* (*dw*), yaitu tidak akan terjadi autokorelasi jika nilai $du < dw < (4-dL)$.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan metode grafik *Glejser*. Hal ini dapat dilihat jika nilai probabilitas > 0,05 menandakan tidak terkena heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda. Penelitian ini memiliki empat hipotesis yang akan dianalisis dengan dua model persamaan. Model 1 dianalisis menggunakan analisis berganda untuk menguji pengaruh variabel independen. Model ke-2 menggunakan model selisih mutlak untuk menguji pengaruh variabel moderasi. Frucot dan Shearon (1991) mengajukan model regresi yang agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model selisih mutlak variabel independen dengan moderasi. Nilai *Adjusted R²* hasil regresi pertama dibandingkan dengan regresi ke-2. Jika terjadi peningkatan *Adjusted R²*, berarti proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit merupakan variabel moderasi. Rumus persamaan regresi sebagai berikut:

$$AP = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 APK - \beta_3 KI - \beta_4 KA + e$$

$$AP = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 ALK - \beta_3 KI - \beta_4 KA - \beta_5 |ALK - KI| - \beta_6 |ALK - KA| + e$$

Keterangan:

Persamaan 1:

AP : Agresivitas Pajak

CSR : *Corporate Social Responsibility*

APK : Agresivitas Pelaporan

Keuangan

KI : Komisaris Independen

KA : Komite Audit

Persamaan 2:

- AP : Agresivitas Pajak
- CSR : Nilai standardized skor CSR
- APK : Nilai standardized skor APK
- KI : Nilai standardized skor KI
- KA : Nilai standardized skor KA
- |ALK-KI| : Nilai interaksi selisih APK dan KI
- |ALK-KA| : Nilai interaksi selisih APK dan KA
- $\beta_1 - \beta_6$: Koefisien Regresi
- e : error / residual

HASIL DAN PEMBAHASAN

BLUE Test

1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dalam pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dari seluruh nilai residual data yang digunakan dalam penelitian ini sebesar $0.200 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan data yang digunakan sebagai sampel penelitian berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 3 dan tabel 4, nilai *tolerance* variabel independen > 0.1 dan nilai VIF semuanya < 10 yang berarti tidak ada multikolinieritas antar variabel independen. Uji Multikolinieritas

untuk pengujian variabel moderasi menggunakan nilai selisih mutlak. Menurut Frucot dan Shearon (1991) dalam Ghozali (2011) selisih nilai mutlak lebih disukai karena ekspektasi sebelumnya berhubungan antara kombinasi APK dengan KI dan KA berpengaruh terhadap AP. Skor tinggi (skor rendah) APK berasosiasi dengan skor rendah (skor tinggi) KI dan/atau KA, maka akan terjadi perbedaan *absolute* yang besar. Kedua kombinasi tersebut diharapkan dapat mengurangi AP.

3. Uji Autokorelasi

Metode Theil-Nagar digunakan untuk mentransformasikan data dalam bentuk Lag agar tidak terkena autokorelasi (Ghozali, 2011). Persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$LagX = X - p * Lag(X)$$

$$p = \frac{n^2 \left(1 - \frac{DW\ awal}{2}\right) + k^2}{n^2 - k^2}$$

Dimana X merupakan variabel, n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah kelas (independen dan moderasi).

Dari tabel 5 menunjukkan bahwa model 1 memiliki nilai DW sebesar 1.817 yang memenuhi asas $dU < dw < 4-dL$ yaitu $1.7485 < 1.817 < 2.4433$, sehingga dapat disimpulkan model 1 bebas dari autokorelasi. Tabel 6 menunjukkan bahwa model 2

memiliki nilai DW sebesar 1.833 yang memenuhi asas $dU < dw < 4-dL$ yaitu $1.8010 < 1.833 < 2.4925$, sehingga dapat disimpulkan model 2 bebas dari autokorelasi. Berdasarkan tabel 5 dan 6 dapat disimpulkan bahwa model penelitian sebelum dan sesudah moderasi tidak mengalami autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan padatabel 7 dan tabel 8 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini lebih besar dari α (0,05), dapat disimpulkan data penelitian sebelum dan sesudah moderasi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 1. Uji Normalitas sebelum Moderasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.42567298
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.052
	Negative	-.046
Kolmogorov-Smirnov Z		.052
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c, d}

Tabel 2. Uji Normalitas setelah Moderasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.41587966
Most Extreme Differences	Absolute	.045
	Positive	.045
	Negative	-.041
Kolmogorov-Smirnov Z		.045
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c, d}

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas sebelum Moderasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
	1 (Constant)	-1.370	.439				-3.121
CSR	2.462	.611	.343	4.030	.000	.984	1.017
APK	.077	.022	.299	3.417	.001	.933	1.072
KI	2.465	.444	.491	5.556	.000	.913	1.096
KA	.255	.122	.180	2.097	.039	.969	1.032

a. Dependent Variable: AP

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas sesudah Moderasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
	1 (Constant)	.592	.115				5.147
Zscore(CSR)	.194	.047	.351	4.163	.000	.981	1.019
Zscore(APK)	.370	.138	.669	2.671	.009	.111	8.980
Zscore(KI)	.203	.060	.367	3.368	.001	.589	1.698
Zscore(KA)	.093	.078	.168	1.196	.235	.354	2.822
AbsAPKKI	.192	.098	.449	1.958	.054	.133	7.546
AbsAPKKA	.000	.094	.001	.003	.998	.164	6.108

a. Dependent Variable: AP

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi sebelum Moderasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.593 ^a	.351	.320	.41401	1.817

a. Predictors: (Constant), lagKA, lagAPK, lagCSR, lagKI

b. Dependent Variable: lagAP

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi sesudah Moderasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.612 ^a	.374	.327	.41027	1.833

a. Predictors: (Constant), lagAPKKA1, lagCSR1, lagKI1, lagKA1, lagAPK1, lagAPKKI1

b. Dependent Variable: lagAP1

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas sebelum Moderasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.358	.233		1.539	.128		
CSR	.127	.324	.042	.391	.697	.984	1.017
APK	.019	.012	.178	1.628	.107	.933	1.072
KI	.454	.235	.213	1.932	.057	.913	1.096
KA	-.065	.064	-.108	-1.008	.316	.969	1.032

a. Dependent Variable: ABSRES_1

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas sesudah Moderasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.416	.063		6.606	.000		
Zscore(CSR)	-.007	.026	-.030	-.281	.780	.981	1.019
Zscore(APK)	-.055	.076	-.228	-.722	.473	.111	8.980
Zscore(KI)	.063	.033	.263	1.909	.060	.589	1.698
Zscore(KA)	-.018	.042	-.076	-.430	.668	.354	2.822
AbsAPKKI	-.064	.054	-.348	-1.199	.234	.133	7.546
AbsAPKKA	-.028	.051	-.141	-.542	.589	.164	6.108

a. Dependent Variable: absres_4

Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi dapat dilihat di tabel 9 dan tabel 10 di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_1 = 0,439 + 2,462CSR + 0,077APK + 2,465KI + 0,255KA$$

$$Y_2 = 0,592 + 0,194CSR + 0,370APK + 0,203KI + 0,093KA + 0,192|APK-KI| + 0,000|APK-KA|$$

Tabel 9. Hasil Uji Nilai-t sebelum Moderasi

	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
	(Constant)	-1.370	.439	-3.121
CSR	2.462	.611	4.030	.000
APK	.077	.022	3.417	.001
KI	2.465	.444	5.556	.000
KA	.255	.122	2.097	.039

Tabel 10. Hasil Uji Nilai-t setelah Moderasi

	Unstandardized		t	Sig.
	Coefficients			
	B	Std. Error		
(Constant)	.592	.115	5.147	.000
Zscore(CSR)	.194	.047	4.163	.000
Zcroe(APK)	.370	.138	2.671	.009
Zcroe(KI)	.203	.060	3.368	.001
Zcroe(KA)	.093	.078	1.196	.235
AbsAPKKI	.192	.098	1.958	.054
AbsAPKKA	.000	.094	.003	.998

Adjusted R Square (R²)

Nilai dari *Adjusted R Square* sebelum moderasi sebesar 0.380, artinya variabel Agresivitas Pajak dapat dijelaskan sebesar 38% oleh variabel CSR, APK, KI dan KA, sedangkan *Adjusted R Square*

sesudah moderasi sebesar 0.393, artinya variabel Agresivitas Pajak dapat dijelaskan sebesar 39,3% oleh variabel CSR, APK, KI, KA, APKKI dan APKKA. Nilai *Adjusted R Squared* isajikan dalam tabel tabel 11 dan 12 di bawah ini.

Tabel 11. Koefisien Determinasi sebelum Moderasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.639 ^a	.408	.380	.43580948

a. Predictors: (Constant), KA, APK, CSR, KI

b. Dependent Variable: AP

Tabel 12. Koefisien Determinasi sesudah Moderasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.660 ^a	.435	.393	.43100747

a. Predictors: (Constant), AbsAPKKA, Zscore(CSR), Zscore(KI), Zscore(KA), AbsAPKKI, Zscore(APK)

b. Dependent Variable: AP

Uji Statistik F

Model regresi sebelum dan sesudah moderasi memiliki nilai sig sebesar $0,000 < \alpha (0,005)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel

independen dalam model penelitian secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 13 dan 14 di bawah ini.

Tabel 13. Hasil Uji Nilai-F sebelum Moderasi ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.869	4	2.717	14.307	.000 ^b
	Residual	15.764	83	.190		
	Total	26.634	87			

a. Dependent Variable: AP

b. Predictors: (Constant), KA, APK, CSR, KI

Tabel 14. Hasil Uji Nilai-F sesudah Moderasi ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.586	6	1.931	10.395	.000 ^b
	Residual	15.047	81	.186		
	Total	26.634	87			

Tabel 15. Hasil Uji Nilai-t setelah Moderasi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.592	.115			5.147	.000
Zscore(CSR)	.194	.047	.351		4.163	.000
Zscore(APK)	.370	.138	.669		2.671	.009
Zscore(KI)	.203	.060	.367		3.368	.001
Zscore(KA)	.093	.078	.168		1.196	.235
AbsAPK KI	.192	.098	.449		1.958	.054
AbsAPK KA	.000	.094	.001		.003	.998

a. Dependent Variable: AP

Hasil Uji t

Hasil uji t disajikan dalam tabel 15. Nilai signifikansi $0,000 < \alpha$, **H₁ Terdukung**. Sejalan dengan hasil penelitian Rini dkk., (2015), Pradipta dan Supriyadi (2015), Lanis dan Richardson (2013). Pemenuhan kewajiban CSR dilakukan perusahaan untuk menutupi citra perusahaan agar semata-mata terlihat baik, mendapat dukungan dari masyarakat dan lingkungan. Semakin besar pengungkapan CSR, maka semakin tinggi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Nilai signifikansi $0,009 < \alpha$, **H₂ Terdukung**. Sejalan dengan hasil penelitian Frank *et al.*, (2009), Ridha dan Martani (2014), Kamila (2014). Perusahaan berusaha untuk menyajikan laba yang tinggi agar menarik bagi investor, akan tetapi jumlah laba yang tinggi juga disertai dengan peningkatan jumlah kewajiban perpajakan, sehingga perusahaan berusaha untuk memaksimalkan jumlah laba tetapi beban pajak yang dibayarkan rendah. Semakin tinggi tindakan agresivitas pelaporan keuangan yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak.

Nilai signifikansi $0,054 > \alpha$, sehingga **Hipotesis 3_a Tidak Terdukung**. Sejalan dengan Ridha

dan Martani (2014), Pradipta dan Supriyadi (2015), Utami dan Setyawan (2015) dan Darmawan (2016) bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komisaris Independen yang ada di perusahaan belum mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan serta kurangnya kontrol terhadap karyawan, sehingga mudah melakukan agresivitas. Banyaknya jumlah komisaris independen tidak menjamin efektivitas penerapan GCG, karena hanya berperan sebagai pemenuhan regulasi. Semakin banyak jumlah komisaris independen koordinasi untuk menyatukan pendapat semakin sulit, karena banyaknya perbedaan pendapat. Hal tersebut justru memperlambat waktu pemecahan masalah, sehingga dimanfaatkan manajer untuk berbuat kecurangan. Selain itu peran pemegang saham mayoritas dalam perusahaan masih sangat kuat, sehingga cenderung menyetir aktivitas perusahaan (Pradipta dan Supriyadi, 2015).

Nilai sig $0,998 > \alpha$, sehingga **Hipotesis 3_b Tidak Terdukung**. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Darmawan (2016), Utami dan Setyawan (2015), Winarsih dkk., (2014) yang menyatakan bahwa

komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya komite audit dalam perusahaan tidak mampu mengontrol tindakan manajer. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya peran Komite Audit dalam aktivitas perusahaan. Komite audit melakukan menjalankan tugasnya berdasarkan bukti-bukti transaksi, tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional, sehingga tidak mengetahui apakah jumlah pengeluaran sesungguhnya sesuai dengan bukti yang ada. Salah satu pemicunya adalah belum adanya keselarasan tujuan antara karyawan, manajemen dan pimpinan, sehingga jika tidak diawasi mereka berbuat kecurangan.

Komite audit yang ada dalam perusahaan hanya sebagai pemenuhan regulasi pemerintah bagi perusahaan *go public*. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit yang bertugas dalam melakukan pengawasan, pengevaluasian kinerja operasional, meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak berjalan efektif apabila tidak mendapat dukungan dari keseluruhan elemen yang ada di dalam perusahaan.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Pemenuhan kewajiban CSR dilakukan perusahaan untuk menutupi citra perusahaan agar semata-mata terlihat baik, mendapat dukungan dari masyarakat dan lingkungan. Semakin besar pengungkapan CSR, maka semakin tinggi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan berusaha untuk menyajikan laba yang tinggi agar menarik bagi investor, akan tetapi jumlah laba yang tinggi juga disertai dengan peningkatan jumlah kewajiban perpajakan, sehingga perusahaan berusaha untuk memaksimalkan jumlah laba tetapi beban pajak yang dibayarkan rendah. Semakin tinggi tindakan agresivitas pelaporan keuangan yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak.

3. Proporsi dewan komisaris independen yang digunakan sebagai proksi *good corporate governance*

tidak berpengaruh dalam memoderasi hubungan agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak. Ini berarti keberadaan Dewan Komisaris Independen belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif sesuai peraturan perundang-undangan serta kurangnya kontrol terhadap karyawan, sehingga mudah melakukan agresivitas. Banyaknya jumlah komisaris independen tidak menjamin efektivitas penerapan GCG, karena hanya berperan sebagai pemenuhan regulasi. Semakin banyak jumlah komisaris independen koordinasi untuk menyatukan pendapat semakin sulit, karena banyaknya perbedaan pendapat. Hal tersebut justru memperlambat waktu pemecahan masalah, sehingga dimanfaatkan manajer untuk berbuat kecurangan. Selain itu peran pemegang saham mayoritas dalam perusahaan masih sangat kuat, sehingga cenderung menyetir aktivitas perusahaan.

4. Komite audit yang digunakan sebagai proksi *good corporate governance* tidak berpengaruh dalam memoderasi hubungan agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak. Adanya komite audit dalam perusahaan tidak mampu mengontrol tindakan manajer. Hal tersebut dapat terjadi

karena kurangnya peran Komite Audit dalam aktivitas perusahaan. Komite audit melakukan menjalankan tugasnya berdasarkan bukti-bukti transaksi, tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional, sehingga tidak mengetahui apakah jumlah pengeluaran sesungguhnya sesuai dengan bukti yang ada. Salah satu pemicunya adalah belum adanya keselarasan tujuan antara karyawan, manajemen dan pimpinan, sehingga jika tidak diawasi mereka berbuat kecurangan. Komite audit yang ada dalam perusahaan hanya sebagai pemenuhan regulasi pemerintah bagi perusahaan *go public*. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit yang bertugas dalam melakukan pengawasan, pengevaluasian kinerja operasional, meningkatkan integritas dan kridebilitas pelaporan keuangan tidak berjalan efektif apabila tidak mendapat dukungan dari keseluruhan elemen yang ada di dalam perusahaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu: data mengenai agresivitas pajak perusahaan disini hanya didasarkan dari laporan keuangan, sehingga kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya, belum bisa membuktikan pengaruh GCG dalam memoderasi hubungan agresivitas pelaporan keuangan dengan agresivitas pajak,

sampel perusahaan terbatas pada sektor manufaktur dan hanya 128 sampel perusahaan manufaktur, ceklist variabel *Corporate Social Responsibility* melibatkan subjektivitas peneliti, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran antara perusahaan satu dengan lainnya.

Saran yang dapat diberikan untuk perbaikan penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index.
2. Menggunakan SPSS 23 atau PLS sebagai alat bantu analisis.
3. Menambah variabel struktur kepemilikan perusahaan, tarif pajak dan karakteristik perusahaan dan apabila data pajak penghasilan perusahaan memungkinkan untuk diperoleh.

REFERENSI

Al-Qur`an, Surat At-Taubah ayat 29.

Adisamartha, Ida Bagus Putu Fajar dan Naniek Noviari. 2015. Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat

Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.13, 3 Desember

2015: 973-1000 ISSN: 2303-1018.

Bursa Efek Indonesia. 2015. Laporan Keuangan dan Tahunan. <http://www.idx.co.id/>. Diunduh tanggal 29 Juni 2016.

Bursa Efek Indonesia. 2015. Laporan Keuangan dan Tahunan. <http://www.idx.co.id/>. Diunduh tanggal 29 Juni 2016.

Darmawan, Hendra. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Deegan, Craig, Michaela Rankin and John Tobin. 2002. An Examination of The Corporate Social And Environmental Disclosures of BHP from 1983-1997. *Accounting, Auditing & Accountability*, Vol. 15 No. 3, pp. 312-43.

Fatayaningrum, Desie. 2011. Analisis Pengaruh Manajemen Laba dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Corporate Environmental Disclosure*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Semarang: Universitas Diponegoro.

Frank, *et al.*, 2009. Tax Reporting Aggressiveness And Its Relation To Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84 (2), 467-496. Retrieved From <http://bit.ly/1SXMdGv>.

Frucot, V dan Shearon, W.T, 1991. Budgetary Participation, Locus of Control, and Mexican Managerial Performance and Job Satisfaction. *The Accounting Review*, Vol 66 No. 1 January.

- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Global Reporting Initiative. 2013. G4 Pedoman Pelaporan Keberlanjutan. Amsterdam: Dewan Direksi GRI website www.globalreporting.org.
- Gray, Rob, Reza Kouhy and Simon Lavers. 1995. Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of The Literature and A Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 8 No. 2, pp. 47-77.
- Hendriyani, Ririn dan Afrizal Tahar. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 22, No. 1, Maret 2015 Hal: 25-33.
- Irawan, Azis. 2016. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba sebagai Variable Pemoderasi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Jannah, Kurniasih Miftakhul. 2016. Menkeu Akui Rasio Pajak Indonesia Masih Rendah. Diunduh tanggal 24 Maret 2016, <http://bit.ly/23AGzvE>.
- Jensen, M.C Dan W.H. Meckling. 1976. Theory Of Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost, And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics* 3: 305-360.
- Jessica dan Agus Arianto Toly. 2014. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No.1, 2014.
- Kamila, Putri Almainda. 2014. Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak. *Finance And Banking Journal*, Vol. 16 No. 2 Desember 2014.
- Kartika, Alda. 2013. Etika Bisnis pada Industri Kelapa Sawit melalui Implementasi *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Juli 2013.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Divisi Penerbitan KNKG.
- Lanis, Roman dan Grant Richardson. 2011. The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness. *Journal Accounting Public Policy*, 30, 50-70.
- Lanis, Roman dan Grant Richardson. 2013. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Menteri BUMN. 2011. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 tentang *Penerapan Tata Kelola*

- Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).*
- Minnick, K., & Noga, T. 2010. Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?. *Journal of Corporate Finance*, Vol. 16, No. 5, pp. 703-718
- Nahar, Aida. 2012. Analisis Praktik *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Furniture di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 13 No. 2, Juli 2012, Hal: 116-129.
- Nazaruddin, Ietje dan Agus Tri Basuki. 2016. *Analisis Statistik dengan SPSS*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Danisa Media: Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 pasal 23A Amandemen III.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 Huruf (b) tentang *Penanaman Modal*.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang *Perseroan Terbatas*.
- Pemerintah Republik Indonesia Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf (a) tentang Pajak Penghasilan.
- Pradipta, Dyah Ayu dan Supriyadi. 2015. *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen terhadap Praktik Penghindaran Pajak*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
- Pratolo, Suryo. 2008. Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Organisasional Manajer, Pengendalian Intern terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 9, No. 1, Januari 2008, Hal: 22-47.
- Prayogo, Kosyi Hadi. 2015. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan, *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ratmono, Dwi dan Winarti Monika Sagala. 2015. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. *Jurnal Nominal*, Vol IV No. 2 hal 16-30.
- Rebecca, Yulisa. 2012. Pengaruh *Corporate Governance Index*, Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Depok: Universitas Indonesia.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. 2013. The Impact of Board of Director Oversight Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal Accounting Public Policy*, 32, 68-88.
- Ridha, Muhammad dan Dwi Martani. 2014. *Analisis terhadap Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.

- Rini, Diah Mustika, Lilik Handajani dan Elin Erlina Sasanti. 2015. *Agresivitas Pajak pada Perusahaan Publik Indonesia yang Melakukan Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
- Scott, William R. 2009. *Financial Accounting Theory (5th ed)*, Prentice Hall Inc.
- Shackelford, D. & T. Shevlin. 2000. Empirical Tax Research In Accounting. *Journal of Accounting And Economics* 31 (1-3): 321-387.
- Shleifer, A., dan Vishny R. W. 1997. A Survey Of Corporate Governance. *Journal Of Finance*, 52, 737-783.
- Slemrod, Joel. 2004. The Economics of Corporate Tax Selfishness. *National Tax Journal, National Tax Association*, Vol. 57(4), pages 877-99.
- Suryana, Anandita Budi. 2012. Menisik Pajak Perusahaan Global. Diunduh tanggal 20 April 2016, <http://bit.ly/1UMCwfo>. Diakses tanggal 20 April 2016 pukul 21.00 WIB.
- Sutiyok dan Evi Rahmawati. 2014. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS di Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2014.
- The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). 2012. *Good Corporate Governance*. Diunduh tanggal 1 Juni 2016, <http://bit.ly/1U2AJPg>.
- Utami, Wahyu Tri dan Hendri Setyawan. 2015. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Tindakan Pajak Agresif dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderating. *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* (Vol. 2, No. 1, pp. 413-421).
- Yoehana. 2013. Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wicaksono, Adhi. Men Keuangan Akui Rasio Pajak Indonesia Tidak Wajar website <http://bit.ly/1Od6QhN>.
- Winarsih, Rina, Prasetyono dan Muhammad Syah Kusufi. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Tindakan Pajak Agresif. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.
- World Business Council in Sustainable Development. *Corporate Social Responsibility*. Diunduh tanggal 1 Juni 2016, <http://bit.ly/1soLbKg>